



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

Pemkab Melawi Raih WTP Beruntun Keempat Kali

Pemerintah Kabupaten Melawi berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Melawi, Kluisen dan didampingi Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9/5).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2022 ini merupakan keempat

kalinya berturut-turut yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Melawi juga mendapatkan Opini WTP atas LKPD 2019, 2020, dan 2021.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Wahyu Priyono dalam sambutannya mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kabupaten Melawi telah sesuai dengan SAP.

“Penyusunan LKPD telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat kepatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, sehingga BPK memberikan opini WTP,” terangnya.

Ia mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan kewajiban

untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesuai dengan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004.

“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Kluisen usai menerima LHP tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, dan patut diapresiasi upaya seluruh Satker di Kabupaten Melawi,” ungkapnya.

Kluisen menegaskan bahwa opini WTP yang diterima untuk keempat kalinya ini bukanlah merupakan akhir, melainkan harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi untuk terus bekerja lebih baik lagi.

“Opini WTP ini harus dapat dipertahankan dan harus kita tingkatkan lagi kualitasnya,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam keterangannya, mengatakan Predikat Opini WTP yang diterima untuk

keempat kalinya ini menjadi upaya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

“Terkait rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK, saya minta Satuan Kerja untuk segera menindaklanjutinya,” pesannya. **(eko susilo)**



PENYERAHAN LHP - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Kepala BPK RI perwakilan Kalbar kepada Wabup Kluisen yang juga dihadiri Ketua DPRD Melawi.